

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan, karena pada tahap inilah suatu kebijakan yang telah dirumuskan diuji dalam praktik nyata. Kebijakan yang secara normatif dirancang dengan baik tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan aktor, sumber daya, struktur organisasi, serta dinamika lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Menurut pandangan klasik dalam studi kebijakan publik, implementasi merupakan jembatan antara keputusan politik dan hasil kebijakan. (Pressman & Wildavsky, 1973) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional. Dalam proses tersebut, sering terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan realitas yang dihadapi oleh pelaksana di tingkat bawah, termasuk di satuan pendidikan.

Pendekatan yang banyak digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah model yang dikemukakan oleh (Edwards, 1980), yang menekankan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam konteks pengelolaan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS, komunikasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana regulasi, petunjuk teknis, dan kebijakan penggunaan ARKAS dipahami secara jelas oleh kepala sekolah dan bendahara. Ketidakjelasan informasi atau perbedaan penafsiran terhadap kebijakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perencanaan maupun pelaporan keuangan sekolah.

Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur teknologi, serta waktu yang memadai untuk melaksanakan kebijakan. Meskipun ARKAS dirancang sebagai sistem digital yang terintegrasi, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kemampuan pengelola keuangan sekolah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut secara tepat.

Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam praktiknya, implementasi ARKAS tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga kesediaan pelaksana untuk menyesuaikan pola kerja dan budaya administrasi keuangan sekolah.

Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur kerja, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan Dana BOSP. Struktur birokrasi yang terlalu kaku atau tidak

adaptif dapat menghambat fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan operasional yang dinamis.

Dengan demikian, implementasi aplikasi ARKAS dalam pengelolaan Dana BOSP dapat dipahami sebagai proses implementasi kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara regulasi, pelaksana, dan sistem pendukung. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini tidak hanya melihat apakah ARKAS digunakan atau tidak, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

## **2.2 Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam manajemen satuan pendidikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Keuangan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi sebagai suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pengelolaan keuangan pendidikan merupakan bagian dari manajemen pendidikan yang menekankan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui

perencanaan anggaran yang rasional, penggunaan dana yang tepat sasaran, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja manajemen sekolah.

Dalam perspektif kebijakan publik, pengelolaan keuangan pendidikan juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa setiap penggunaan dana publik harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab (Republik Indonesia, 2003). Sekolah sebagai satuan kerja yang menerima dana dari pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat sekolah umumnya mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan. Tahap perencanaan diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat program, kegiatan, serta alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah. Tahap pelaksanaan berkaitan dengan realisasi penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas sekolah kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut (Fattah, 2013), pengelolaan keuangan pendidikan yang baik harus mampu menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kelemahan dalam perencanaan atau pelaporan keuangan berpotensi menimbulkan inefisiensi, ketidaktepatan penggunaan dana, bahkan masalah akuntabilitas.

Dalam konteks otonomi sekolah, pengelolaan keuangan pendidikan juga menuntut adanya kapasitas manajerial yang memadai dari kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama kebijakan dan arah penggunaan anggaran, sedangkan bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknis dan administrasi keuangan. Sinergi antara kedua peran tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang baik (*good school governance*).

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan tuntutan akuntabilitas publik, pengelolaan keuangan pendidikan saat ini diarahkan untuk memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Penggunaan sistem informasi keuangan sekolah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mempermudah proses pengawasan dan pelaporan. Dalam konteks inilah aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) hadir sebagai instrumen kebijakan yang

dirancang untuk memperkuat tata kelola keuangan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dengan demikian, pengelolaan keuangan pendidikan dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu proses manajerial yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS. Kualitas implementasi ARKAS sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan diterapkan secara konsisten oleh satuan pendidikan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan.

### **2.3 Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)**

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan formal. BOSP diposisikan sebagai bentuk intervensi negara dalam memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan secara efektif tanpa membebani peserta didik dan orang tua, khususnya dalam pembiayaan operasional nonpersonalia sekolah.

Secara konseptual, Dana BOSP tidak hanya dipahami sebagai bantuan keuangan, tetapi sebagai kebijakan publik yang memiliki tujuan strategis, yaitu meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat. Dalam konteks tersebut, BOSP merupakan wujud konkret tanggung jawab pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Pengelolaan Dana BOSP diatur secara teknis melalui peraturan menteri yang diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pendidikan. Regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 tahun 2025 tentang Peyunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan, menegaskan bahwa Dana BOSP harus dikelola berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Kemendikdasmen RI, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan sekolah tidak hanya sebagai penerima dana, tetapi sebagai pengelola dana publik yang memiliki tanggung jawab administratif dan moral.

Dalam praktiknya, Dana BOSP digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Penggunaan dana diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan, termasuk penyediaan sarana pembelajaran, pengembangan kegiatan belajar mengajar, serta dukungan terhadap manajemen sekolah. Oleh karena itu, BOSP memiliki keterkaitan yang erat dengan mutu layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

Menurut (Fattah, 2013), efektivitas dana pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaannya, bukan semata-mata oleh besaran dana yang

diterima. Dana yang besar tidak akan berdampak optimal apabila tidak dikelola dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, serta pelaporan yang akuntabel. Pandangan ini menegaskan bahwa Dana BOSP harus dipahami sebagai instrumen strategis yang memerlukan sistem pengelolaan yang kuat dan terstandar.

Dalam konteks kebijakan desentralisasi pendidikan, pengelolaan Dana BOSP memberikan ruang otonomi kepada sekolah untuk menentukan prioritas penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Namun, otonomi tersebut dibatasi oleh regulasi dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dan bendahara sekolah sebagai pengelola teknis memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa penggunaan Dana BOSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, pengelolaan Dana BOSP tidak lagi dapat dilakukan secara manual dan konvensional. Pemerintah kemudian mengintegrasikan kebijakan Dana BOSP dengan sistem informasi keuangan sekolah melalui penerapan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana BOSP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan mudah diawasi.

Dengan demikian, Dana BOSP dalam penelitian ini dipahami sebagai kebijakan publik yang implementasinya sangat bergantung pada sistem pengelolaan keuangan sekolah. Keberadaan aplikasi ARKAS menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara ketentuan normatif kebijakan Dana BOSP dengan praktik pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi aplikasi ARKAS tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap konsep dan karakteristik Dana BOSP itu sendiri.

#### **2.4 Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)**

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pengelolaan keuangan sekolah secara tertib, transparan, dan akuntabel. ARKAS tidak hanya diposisikan sebagai perangkat teknis pencatatan anggaran, tetapi sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kehadiran ARKAS dapat dipahami sebagai bentuk policy instrument, yaitu alat yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Dana BOSP dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Nugroho, 2014) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk menerjemahkan kebijakan dari level normatif ke level

operasional. Dalam konteks ini, ARKAS berfungsi sebagai media penerjemah kebijakan pengelolaan Dana BOSP ke dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah.

Secara substantif, aplikasi ARKAS dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan secara sistematis melalui ARKAS dengan mengacu pada struktur akun dan komponen belanja yang telah ditetapkan. Mekanisme ini secara langsung membatasi ruang terjadinya perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mendorong sekolah untuk menyusun perencanaan yang lebih tertib dan rasional.

Keberadaan ARKAS juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana BOSP. Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas sektor publik menuntut adanya sistem yang mampu mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas dan dapat ditelusuri. ARKAS memenuhi tuntutan tersebut melalui mekanisme pencatatan digital yang terdokumentasi dan terintegrasi, sehingga setiap penggunaan Dana BOSP dapat dipantau dan diaudit secara lebih mudah.

Dalam konteks manajemen sekolah, penggunaan ARKAS menuntut adanya perubahan pola kerja pengelola keuangan. Kepala sekolah tidak lagi hanya berperan sebagai pengambil keputusan anggaran, tetapi juga sebagai

pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan sistem dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, bendahara sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dalam mengoperasikan aplikasi serta memahami keterkaitan antara perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan berbasis sistem.

Meskipun demikian, implementasi ARKAS di tingkat satuan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya manusia dan kesiapan organisasi. (Edwards, 1980) menegaskan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ARKAS, keterbatasan pemahaman pengguna, perubahan regulasi yang relatif cepat, serta dinamika kebutuhan sekolah menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya.

Dengan demikian, aplikasi ARKAS dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menstandarkan pengelolaan Dana BOSP di tingkat sekolah. Efektivitas ARKAS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem yang digunakan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh aktor-aktor pelaksana di satuan pendidikan.

Pemahaman terhadap konsep dan fungsi ARKAS ini menjadi landasan penting dalam menganalisis implementasi aplikasi ARKAS dalam

pengelolaan Dana BOSP pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

## **2.5 Ketekaitan Implementasi ARKAS dengan Pengelolaan BOSP**

Implementasi aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Keterkaitan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan bagaimana kebijakan pengelolaan Dana BOSP diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah secara sistematis dan terstandar.

Secara konseptual, Dana BOSP merupakan kebijakan publik yang menuntut pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut tidak akan dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya sistem yang mampu mengarahkan dan mengendalikan perilaku pengelola keuangan di tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks inilah aplikasi ARKAS berperan sebagai instrumen implementasi kebijakan Dana BOSP.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, (Edwards, 1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan instrumen yang jelas dan operasional. ARKAS menyediakan kerangka operasional tersebut dengan cara mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan Dana BOSP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Melalui

ARKAS, ketentuan normatif kebijakan Dana BOSP diterjemahkan ke dalam format kerja yang harus diikuti oleh sekolah.

Pada tahap perencanaan, keterkaitan antara ARKAS dan Dana BOSP tercermin dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). ARKAS mengarahkan sekolah untuk menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan komponen dan batasan penggunaan Dana BOSP yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Mekanisme ini membatasi ruang interpretasi subjektif sekolah dalam menyusun anggaran, sehingga perencanaan Dana BOSP menjadi lebih tertib dan selaras dengan kebijakan yang berlaku.

Pada tahap pelaksanaan, ARKAS berfungsi sebagai alat pengendali agar realisasi penggunaan Dana BOSP tetap mengacu pada perencanaan yang telah disetujui. Setiap perubahan atau penyesuaian penggunaan dana harus dilakukan melalui mekanisme revisi RKAS di dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa ARKAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kebijakan dalam pengelolaan Dana BOSP.

Sementara itu, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, keterkaitan ARKAS dengan Dana BOSP semakin terlihat melalui integrasi data penggunaan dana yang tersaji secara sistematis dan terdokumentasi. Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas pengelolaan keuangan publik mensyaratkan adanya laporan yang dapat ditelusuri dan diverifikasi. ARKAS memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan data realisasi anggaran

yang bersumber langsung dari proses pelaksanaan, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP di tingkat sekolah.

Dalam konteks manajemen sekolah, keterkaitan ARKAS dan Dana BOSP juga berdampak pada pembagian peran dan tanggung jawab pengelola keuangan. Kepala sekolah dituntut untuk memahami kebijakan dan memastikan kesesuaian penggunaan Dana BOSP dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan bendahara sekolah bertanggung jawab terhadap ketertiban administrasi dan pengoperasian sistem ARKAS. Sinergi antara kedua peran tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola Dana BOSP yang baik.

Dengan demikian, implementasi aplikasi ARKAS tidak dapat dipahami secara terpisah dari pengelolaan Dana BOSP. ARKAS merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana BOSP di tingkat satuan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi aplikasi ARKAS pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan pada hakikatnya merupakan kajian terhadap bagaimana kebijakan Dana BOSP diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah.

Sub bab ini menjadi landasan konseptual yang menghubungkan antara teori implementasi kebijakan, konsep pengelolaan keuangan pendidikan, dan fokus penelitian mengenai implementasi aplikasi ARKAS dalam pengelolaan

Dana BOSP, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan empiris pada bab-bab berikutnya.

## **2.6 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai alur berpikir penelitian dalam mengkaji implementasi aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada SMA Negeri terakreditasi A di Kabupaten Pesisir Selatan. Kerangka konseptual ini menjadi penghubung antara landasan teori, fokus penelitian, dan analisis empiris yang akan disajikan pada bab hasil penelitian.

Kerangka konseptual tidak dimaksudkan sebagai pengujian hubungan kausal sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan sebagai peta analisis yang menuntun peneliti dalam memahami proses implementasi kebijakan secara sistematis, kontekstual, dan berbasis realitas lapangan.

### **2.6.1 Alur Konseptual Implementasi ARKAS dalam Pengelolaan BOSP**

Penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa Dana BOSP merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang menuntut pengelolaan keuangan sekolah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara seragam dan tertib di tingkat satuan pendidikan, pemerintah menghadirkan aplikasi ARKAS sebagai instrumen implementasi kebijakan.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, implementasi aplikasi ARKAS dipahami sebagai suatu proses kebijakan yang berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini ARKAS digunakan sebagai media penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada ketentuan penggunaan Dana BOSP. Perencanaan menjadi fondasi awal yang menentukan arah dan kualitas pengelolaan dana.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini ARKAS berfungsi sebagai acuan realisasi penggunaan Dana BOSP sesuai dengan RKAS yang telah disusun. Setiap pengeluaran harus selaras dengan perencanaan dan dicatat dalam sistem.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini ARKAS digunakan untuk menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana BOSP secara tertib, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.

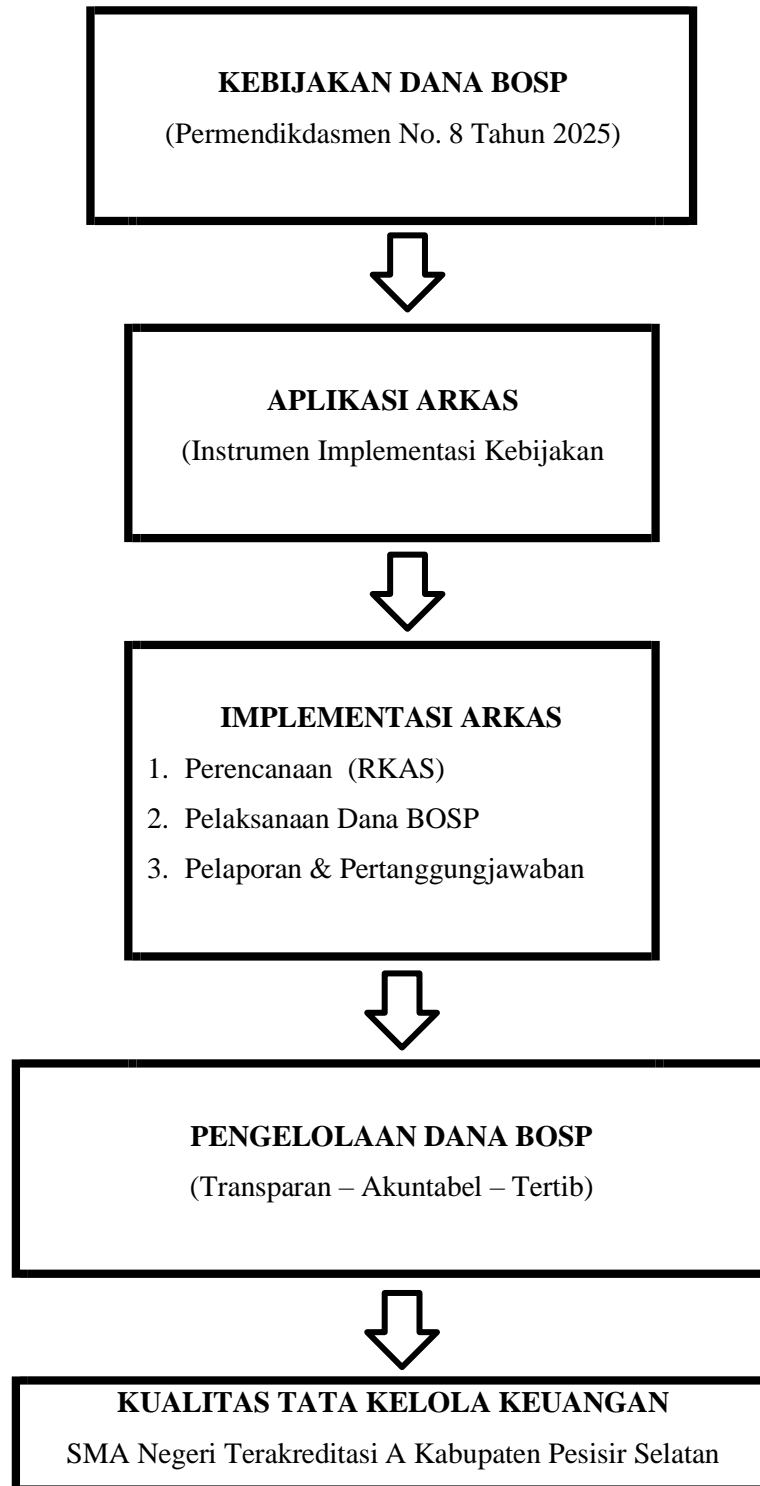
Ketiga tahapan tersebut dipandang sebagai satu kesatuan proses yang saling berkaitan. Kelemahan pada satu tahapan akan berdampak pada tahapan berikutnya, sehingga kualitas implementasi ARKAS tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi ARKAS dalam setiap tahapan tersebut dipengaruhi oleh aktor pelaksana utama di sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan dan bendahara sekolah sebagai pengelola teknis keuangan. Pemahaman kebijakan, kompetensi pengelolaan sistem, serta kedisiplinan administrasi menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi ARKAS.

### **2.6.2 Bagan Kerangka Konseptual**

Untuk memperjelas alur konseptual penelitian serta memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar konsep yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, kerangka berpikir penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan. Penyajian kerangka konseptual dalam bentuk visual dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ringkas dan sistematis mengenai proses implementasi kebijakan Dana BOSP melalui aplikasi ARKAS di tingkat satuan pendidikan. Bagan ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antarvariabel, melainkan untuk menegaskan alur proses pengelolaan Dana BOSP yang berlangsung secara berurutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagaimana menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Konseptual**



## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Mubaro et al., 2025)	Transformasi Digital Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah	ARKAS memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan BOS, namun kendala teknis seperti jaringan dan literasi digital masih signifikan.
2.	(Ningsi, 2024)	Efektivitas Pelaporan Penggunaan Dana BOS Menggunakan Aplikasi ARKAS	ARKAS efektif mempercepat pelaporan, tetapi perlu peningkatan fitur dan pelatihan pengguna karena keterbatasan fasilitas.
3.	(Sahdan, 2023)	Effectiveness of Accountability and Transparency of BOS Fund Management Using the ARKAS Application	ARKAS meningkatkan efisiensi sistem akuntansi BOS dan transparansi melalui wawancara dengan pengelola sekolah.
4.	(Rusmiyati et al., 2025)	Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital	Kajian literatur menemukan aplikasi digital termasuk ARKAS meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
5.	(Suteja & Safuan, 2025)	Analisis Penggunaan ARKAS dalam Pengelolaan Dana BOSP di SMP Negeri Kota Tangerang Selatan	ARKAS berdampak positif pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi masih terkendala pelatihan dan infrastruktur.
6.	(Wulandari & Putri, 2022)	Optimalisasi Penggunaan ARKAS 3.3 pada Pelaporan Dana BOS	ARKAS membantu pelaporan BOS namun masih memerlukan peningkatan implementasi dan dukungan sistem.
7.	(Adnyani & Astawa, 2023)	Analisis Penggunaan ARKAS terhadap Pengelolaan Dana BOS	Implementasi ARKAS di SD menunjukkan peningkatan pemahaman pengelola terhadap aturan BOS dan akuntabilitas.
8.	(Ismatuzzaeni et al., 2024)	Implementation of the School Budget and Activity Plan (ARKAS) Policy in Realizing Good Governance	ARKAS mendukung governance sekolah, meningkatkan transparansi dan partisipasi, walau masih ada hambatan operasional.
9.	(Azahra & Dzikrayah, 2025)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana BOSP	ARKAS 4.0 memperlihatkan peningkatan keterbukaan informasi anggaran dan kesesuaian rencana-realiasi,

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
		Menggunakan ARKAS 4.0	tetapi perlu peningkatan kompetensi operator.